

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu fenomena sosial yang paling sering terjadi di Indonesia adalah Kriminalitas. Kriminalitas merupakan jenis tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang kita kenal di Indonesia. Ternyata, kriminalitas tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pada era globalisasi ini, kebudayaan telah berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan ini telah menimbulkan persaingan dalam kehidupan manusia dalam hal ideologi, sosial, ekonomi, dan etika. Bermewah-mewahan, melihat kesenangan hanya dari materi, dan banyak lagi yang telah mengubah perilaku manusia. Ini juga mempengaruhi perubahan nilai yang berlaku di masyarakat, perubahan positif tentu saja menguntungkan masyarakat, tetapi perubahan negatif dapat menyebabkan gangguan di masyarakat, dengan efek negatif seperti melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan tindakan kriminalitas (Putra dkk, 2021; Indah, 2023).

Kehidupan masyarakat semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Adanya teknologi yang berkembang secara signifikan memungkinkan proses urbanisasi disesuaikan dengan lingkungan masyarakat modern yang memerlukan perubahan. Masyarakat modern merasa cemas dan kebingungan, karena kesulitan beradaptasi. Selain itu, masyarakat modern memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh materi yang melimpah meskipun tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memperolehnya. Salah satu faktor yang dapat mendorong

seseorang untuk melakukan tindakan kriminal adalah ketidaksesuaian antara ambisi mereka dan kemampuan pribadi mereka (Maulana,2014).

Menurut Hardianto (2009), kejahatan pada dasarnya timbul akibat karakter manusia yang di latar belakang oleh masalah ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan pencapaian, dan pendapatan yang rendah sehingga seseorang melakukan tindakan kriminal karena kepuasan yang didapat dari hasil melakukan tindakan kejahatan lebih besar di bandingkan dengan yang akan didapat dari hasil perbuatan legal. Kriminalitas hampir terjadi di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di pedesaan, kata "*Crime*" yang berarti kejahatan atau tindakan kriminal. Kriminalitas dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan psikologis (Aditama, 2021). Berbagai masalah perekonomian, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan pendapatan yang rendah, mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminalitas karena hasil yang diperoleh dari tindakan kriminalitas lebih menguntungkan (Rahmalia,dkk 2019).

Di Indonesia kriminalitas menjadi masalah yang kompleks dan sering terjadi yang bisa mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia, seperti kekerasan, perampokan, pencurian, terorisme, hingga narkoba, masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan yang besar mengenai masalah kriminalitas. Masalah ini membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, karena kejahatan kriminalitas akan memberikan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Masyarakat akan merasa gelisah dan takut menjadi korban dari

tindakan kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini dapat mengganggu rasa aman dan nyaman setiap individu, serta tidak memberikan rasa bebas dalam melaksanakan kegiatan.

Masalah kejahatan semakin kompleks yang terjadi pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan keanekaragaman masyarakat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Tindakan kriminal lebih mudah terjadi di lingkungan kota besar yang padat dan penuh aktivitas. Berdasarkan laporan registrasi Mabes Polri selama periode 2019 sampai 2023, jumlah kejahatan di Indonesia berfluktuasi. Pada tahun 2019 terjadi 352.936 kasus kejahatan di Indonesia. Dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Pada tahun 2023 jumlah tindak pidana meningkat menjadi 372.897 kasus kejahatan di Indonesia. Dari 100.000 orang di Indonesia 137 orang berisiko terkena tindak kejahatan (Statistik Kriminalitas, 2024). Dalam laporan *ocindex.net*, Indonesia berada pada peringkat 25 dari 193 negara pada tahun 2021. Pada tahun 2023 Indonesia berada pada tingkat 20 dari 193 negara dengan *safety index* 54,04 dan *crime rate* 45,96. Indonesia berada pada peringkat ke 8 dari 46 negara pada level Asia. Meningkatnya fenomena kejahatan di Indonesia sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah dan juga masyarakat di Indonesia.

Di lingkungan masyarakat yang beragam, kemungkinan seseorang untuk melakukan, kejahatan sangat dipengaruhi oleh masalah kejahatan, yang disebabkan oleh berbagai masalah, terutama masalah ekonomi, sosial, konflik, dan kesadaran hukum. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan kemajuan teknologi informasi, tindakan yang disadari maupun tidak disadari

dapat terjadi. Menurunkan risiko individu terlibat dalam tindak pidana sangat penting untuk meningkatkan rasa aman masyarakat. Ini terutama berlaku di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi. Tabel berikut menunjukkan jumlah kemungkinan penduduk terkena kejahatan yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 1. 1**

**Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate) per 100.000 Penduduk menurut Kepolisian Daerah Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)</b>
2019	103
2020	94
2021	90
2022	137
2023	214

*Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah,2025)*

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat perkembangan jumlah risiko penduduk terkena kejahatan yang dilaporkan per 100.000 penduduk menunjukkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup jauh dari 137 menjadi 214. Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kriminalitas di Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan yang signifikan. Pemicu terjadinya tindakan kriminalitas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan, upah yang tidak memadai dan hukum yang tidak tegas. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada tiga faktor

penentu, yaitu Kemiskinan, Pengangguran, dan Tingkat pendidikan, sebagai faktor yang menentukan tingkat kriminalitas di Indonesia.

Kemiskinan merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, karena kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan sosial yang hampir terjadi di seluruh negara yang sedang berkembang. Mata rantai kemiskinan dapat memicu dan menyebabkan masalah lain, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lainnya. Akibatnya, kemiskinan sendiri akan berdampak buruk pada kehidupan manusia. Berikut dapat dilihat tabel data perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019-2023 pada tabel 1.2.

**Tabel 1. 2**

**Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2023</b>
2019	9.22
2020	10.19
2021	9.71
2022	9.57
2023	9.36

*Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)*

Pada tabel 1.2 terdapat persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang tinggi dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 10,19% pada tahun 2020. Kemiskinan yang tinggi pada tahun 2020 disebabkan oleh kasus Covid-19 yang menyebabkan banyaknya perusahaan

memberhentikan karyawan yang membuat mereka menganggur dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain kemiskinan faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas adalah pengangguran, pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kriminalitas, tingkat pengangguran di suatu wilayah atau negara menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi, dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih rendah di wilayah tersebut. Pengangguran, baik itu tidak memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan, adalah masalah yang harus ditangani karena pengangguran merupakan penyebab dari berbagai masalah sosial dan dapat menyebabkan dampak yang luas. Akibatnya, pengangguran dapat membuat seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan bahkan dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan atau tindakan kriminal.

**Tabel 1. 3**

**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
di Indonesia Tahun 2019-2023 (Persentase)**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase TPT di Indonesia Tahun 2019-2023</b>
2019	5.23
2020	7.07
2021	6.49
2022	5.86
2023	5.32

*Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah, 2025)*

Berdasarkan Tabel di atas terdapat Tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2019-2023. Dapat dilihat pada tahun 2019 tingkat pengangguran di

Indonesia mencapai 5,23%, pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup jauh sebanyak 7,07%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) meningkatnya jumlah pengangguran disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada jumlah penduduk usia kerja yang terdampak. Pada tahun selanjutnya 2021 sampai 2023 jumlah pengangguran mengalami penurunan dari 6,49% turun menjadi 5,86% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,32%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tren pengangguran yang menurun sejalan dengan perbaikan ekonomi pada tahun tahun 2020.

Selain pengangguran, tingkat pendidikan juga merupakan faktor yang paling berpengaruh penyebab terjadinya tindakan kriminalitas, karena pendidikan merupakan modal dasar yang harus dimiliki setiap orang untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Bagaimana seseorang untuk berperilaku, berpikir, dan bertindak di masyarakat terutama dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Kurangnya pendidikan formal pada seseorang, maka akan kehilangan keterampilan atau peluang kerja yang diperlukan, dan hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang hukum dan norma sosial. Orang-orang yang menerima pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan kriminal.

**Tabel 1. 4**

**Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas  
Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas</b>
2019	8,75
2020	8.90
2021	8.97
2022	9.08
2023	9.13

*Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah,2025)*

Tingkat pendidikan dapat diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah. Dari tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2019 sampai 2023 rata-rata jumlah tahun yang diselesaikan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga tingkat lama sekolah rata-rata meningkat setiap tahun. Tingkat pendidikan sangat penting dalam menurunkan tingkat kejahatan di Indonesia. Pendidikan yang lebih baik tidak hanya meningkatkan peluang ekonomi tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pendidikan dan akses menjadi tindakan strategis yang penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

Berdasarkan dari masalah diatas peneliti ingin mengetahui apakah Kemiskinan Pengangguran dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kriminalitas dan apakah tindakan kriminalitas terjadi karena kebutuhan ekonomi

atau sudah menjadi budaya. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Agar penelitian lebih jelas dan terarah. maka penulis membuat identifikasi masalah yang akan diteliti adalah:

1. Ketimpangan ekonomi menciptakan kesenjangan sosial yang dapat meningkatkan kejahatan berbasis ekonomi seperti pencurian, perampokan, dan penipuan.
2. Pengangguran menyebabkan kesulitan ekonomi, yang mendorong individu mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk aktivitas ilegal seperti pencurian, perampokan, atau penipuan.
3. Kurangnya pendidikan dapat mengurangi kesadaran akan nilai moral dan sosial, sehingga meningkatkan risiko perilaku menyimpang atau tindakan ilegal.

## **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.3.1 Batasan Masalah**

Agar penelitian spesifik dan fokus serta untuk membatasi permasalahan yang diteliti, penulis membuat batasan variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut: Kemiskinan, Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia.

### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia?
2. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Akademis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi atau literatur bagi dunia pendidikan.

2. Untuk Pemerintah

Memberikan data atau informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan .

### 3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar penelitian dengan topik yang relevan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kriminalitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana atau yang bersifat kriminal. Kriminalitas juga dapat diartikan sebagai tindak kejahatan yang melanggar hukum, norma, undang-undang, dan nilai yang berlaku di masyarakat dan dapat dikenakan sanksi. Kriminalitas adalah perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang ditetapkan oleh masyarakat. Kriminalitas tidak hanya mencakup kejahatan yang dilakukan oleh individu, tetapi juga kelompok atau organisasi (Sutherland, 1949). Segala bentuk tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku, yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu maupun masyarakat, merupakan tindakan kriminalitas (Soerjono soekanto, 1986). Kepastian hukum diperlukan karena dengan adanya hukum seseorang dapat menentukan benar atau salahnya perbuatan (Burlian, 2016).

Menurut opportunity theory atau teori kesempatan dalam Soraya dkk (2024), menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika individu memiliki kesempatan yang mendukung untuk melakukan tindakan kriminal. Teori ini menganggap bahwa peluang untuk melakukan kejahatan, seperti ketersediaan target yang rentan atau kelemahan dalam sistem pengawasan, memainkan peran yang krusial dalam menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam aktivitas kriminal.

Dalam pengertian sosiologis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia, yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, namun dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat secara ekonomis, psikologis, dan melukai perasaan sosial dalam kehidupan bersama. Kejahatan bersifat universal dan tidak terbatas ruang dan waktu disebabkan ia bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Sebagai sebuah fenomena sosial, kejahatan adalah penyakit dalam sebuah komunitas dan keberadaannya harus diperangi, sebagaimana ilmu hukum memerangi kejahatan karena merupakan sebuah pelanggaran (Maulana, 2014). Secara yuridis, kejahatan berarti segala suatu tindakan atau tingkah laku manusia yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui dapat dipidana secara legal, dan diatur dalam hukum pidana (Rusnani, 2015).

Becker (1968) mengatakan bahwa “ dalam ilmu ekonomi kriminalitas, individu yang melakukan tindakan kriminal cenderung disebabkan oleh faktor finansial untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan cepat dibandingkan dengan melakukan pekerjaan legal atau bekerja pada sektor formal tanpa mempertimbangkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut”.

Teori Anomie awalnya digagas oleh peneliti Emil Durkheim, seorang sosiolog Perancis, memiliki beberapa teori mendasar yang menarik tentang bagaimana keadaan sosial ekonomi mempengaruhi perilaku. Durkheim berpendapat keinginan manusia tidak akan ada habisnya hal ini menjadikan manusia mempunyai ukuran dalam perekonomian, Durkheim menyampaikan bahwa latar belakang terjadinya kejahatan karena kondisi perekonomian makro bukan hanya perekonomian mikro saja. Kemiskinan berdampak meningkatnya pengangguran

dan menyebabkan tingginya kejahatan dikarenakan mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun dengan cara ilegal.

### **2.1.1 Bentuk-Bentuk Kriminalitas**

Bentuk-bentuk tindakan kriminalitas berdasarkan kitab umum Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Pencurian

Mengambil barang milik orang lain tanpa izin orang lain atau diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya disebut pencuri. Dalam Pasal 362 KUHP (Kitab UU Hukum Pidana) mengatur bahwa pencurian terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun.

2. Tindak Asusila

Tindakan yang bertentangan dengan akidah dan norma kesopanan yang selalu terjadi dilingkungan masyarakat. Pasal 289 KUHP menetapkan hukuman 9 tahun penjara sebagai hukuman untuk tindak asusila.

3. Pencopetan

Pencopetan merupakan tindak kejahatan di jalan atau kejahatan jalanan yang di mana pelaku mengambil barang orang lain, biasanya secara diam-diam, dari tempat seperti saku, tas, atau dompet tanpa sepengetahuan korban. Pelaku kejahatan pencopetan akan dikenakan hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan Pasal 365 ayat 3 KUHP.

4. Penjambretan

Penjambretan merupakan tindak pidana yang melibatkan, menarik atau merampas barang orang lain secara paksa, biasanya di tempat umum, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik untuk mempercepat

penguasaan barang oleh pelaku. Perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara 15 tahun berdasarkan Pasal 365 ayat 3 KUHP.

#### 5. Penodongan Senjata Api

Penodongan senjata api merupakan tindak kriminal yang dimana pelaku menggunakan senjata api untuk mengancam korban untuk mendapatkan sesuatu, seperti uang atau barang berharga, atau memaksa korban untuk melakukan tindakan tertentu, ini dianggap perampasan dengan kekerasan. Berdasarkan Pasal 368 KUHP perbuatan ini diberi hukuman pidana paling singkat 10 tahun penjara.

#### 6. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan tindakan yang sengaja menimbulkan kerugian dan penderitaan fisik atau mental terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dalam konteks hukum penganiayaan seringkali digolongkan sebagai tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan hukum pidana. Berdasarkan pasal 351 perbuatan ini menerima hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan.

#### 7. Penipuan

Penipuan merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memperdaya orang lain guna memperoleh suatu keuntungan, biasanya berupa uang atau barang, dan secara hukum tidak sah. Penipuan sering kali melibatkan kebohongan dan manipulasi untuk memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada korban. Pada pasal 378 KUHP

mencantumkan tindakan kriminal ini dijatuhi hukuman maksimal 4 tahun penjara.

#### 8. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan pasal 388 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau kurungan penjara selama 20 tahun.

#### 9. Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan negara dan masyarakat umum. Tindakan ini dikenakan pasal 209 KUHP dengan hukuman penjara 4 tahun.

### **2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Kriminalitas**

Menurut Kansil dalam Dermawanti dkk, (2015), pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut: motivasi intrinsik (faktor intern), meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Motivasi ekstrinsik (faktor ekstern), meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

#### a. Kemiskinan

Menurut Kartono (2009), kemiskinan kronis tanpa jalan keluar mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan.

b. Pengangguran

Menurut catatan Statistika Indonesia (2013), besarnya jumlah angka pengangguran mempunyai pengaruh sosial yang luas karena mereka tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Maka semakin tinggi jumlah angka pengangguran semakin tinggi pula tingkat kerawanan sosial yang ditimbulkan, contohnya kriminalitas.

c. Pendidikan

Menurut Kansil (1994), bahwa tindakan kriminal salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Karena pendidikan merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia.

d. Jumlah Penduduk

Menurut Enrico Ferri dalam buku “Patologi Sosial” oleh Kartono (2009), menyebutkan bahwa salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk.

e. Moral

Menurut Kartono (2009), tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum.

## **2.2 Kemiskinan**

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan

dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty threshold*) (Ferezagia, 2018).

Menurut (World Bank, 2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Selain itu, kemiskinan juga dikaitkan dengan terbatasnya kesempatan kerja, dan masyarakat yang tergolong miskin (*the poor*) biasanya merupakan pengangguran dan tingkat pendidikan serta kesehatannya pada umumnya tidak memadai.

Teori Kausalitas Kumulatif dan Lingkaran Setan Kemiskinan yang digagas oleh Gunnar Myrdal (1968) seorang ekonom dan sosiolog asal Swedia yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang ekonomi pembangunan dan teori sosial. Gunnar berpendapat bahwa kemiskinan adalah hasil dari lingkaran setan yang saling memperkuat. Gunnar menyampaikan rendahnya pendidikan menyebabkan rendahnya pendapatan, yang berujung pada kurangnya akses kesehatan dan pendidikan bagi generasi berikutnya.

### **2.2.1 Klasifikasi Kemiskinan**

#### **1. Kemiskinan Absolut**

Merupakan kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Ini sering diukur dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

#### **2. Kemiskinan Relatif**

Merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat di sekitarnya. Ini menciptakan perasaan terpinggirkan meskipun mereka mungkin dapat memenuhi kebutuhan dasar.

### 3. Kemiskinan Struktural

Disebabkan oleh faktor-faktor sistemik dalam masyarakat, seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya. Ini sering kali terkait dengan kebijakan pemerintah dan struktur ekonomi.

### 4. Kemiskinan Kultural

Disebabkan oleh seseorang itu sendiri karena mereka tidak berusaha untuk bekerja karena adanya rasa malas dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki taraf hidupnya meskipun telah diberi dorongan oleh orang lain.

## **2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan**

Berdasarkan laporan literatur BPS 2022 dalam Triono (2023) terdapat empat penyebab terjadinya kemiskinan:

### 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar

Kemiskinan terjadi akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan (seperti konsumsi minimal 2100 kilo kalori/hari) maupun non makanan (seperti pendidikan dan kesehatan).

### 2. Pengangguran

Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada berkurangnya pendapatan rumah tangga.

### 3. Akses terbatas pada pendidikan dan pelayanan kesehatan

Hal ini menurunkan kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas juga menurun.

#### 4. Inflasi

Inflasi meningkatkan gaya hidup, menyulitkan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok.

### **2.3 Pengangguran**

Menurut Sadono Sukirno dalam Franita dkk, (2019), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan kerja tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Mankiw dalam Rahmi dkk, (2018), pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik dalam Indah (2023), mendefinisikan pengangguran sebagai berikut:

1. Seseorang yang aktif mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja.
2. Seseorang yang tidak mencoba mencari pekerjaan karena merasa tidak yakin akan mendapatkan pekerjaan.

Penduduk yang sedang mempersiapkan pekerjaan/ usaha baru penduduk yang aktif mencari pekerjaan.

Teori Pengangguran Alamiah (*Natural Rate of Unemployment*) digagas oleh Milton Friedman (1968) seorang ekonom Amerika yang terkenal sebagai pemimpin mazhab ekonomi moneteris dan salah satu tokoh ekonomi paling berpengaruh pada abad ke-20. Friedman berpendapat bahwa ada tingkat pengangguran tertentu yang selalu ada dalam ekonomi, bahkan dalam kondisi optimal. Pengangguran ini mencakup pengangguran friksional dan struktural, yang terjadi karena orang-orang berpindah pekerjaan atau keterampilan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

### **2.3.1 Penyebab Pengangguran**

Menurut Rahmi (2018), pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa negara, dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi jumlah angka pengangguran harus adanya kerjasama lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran:

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja.

4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill.

Budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran**

Menurut Rahmi dkk, (2018), pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Berikut 3 jenis pengangguran:

1. Pengangguran Terselubung

Merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu.

2. Setengah Menganggur

Merupakan tenaga kerja yang kurang dari 35 jam perminggu.

3. Pengangguran Terbuka

Merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan.

### **2.4 Tingkat Pendidikan**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Hariandja dalam Khafidhoh (2021), menyebutkan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan. Maka dari itu, seseorang harus mempunyai keahlian yang diperoleh melalui proses jenjang yang tinggi.

Dalam perspektif ekonomi dalam penelitian Khafidhoh (2021), pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang akan memberi keuntungan di masa mendatang, baik kepada masyarakat atau negara, maupun orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat di wujudkan.

Teori pendidikan kritis digagas oleh Paulo Freire seorang filsuf pendidikan asal Brasil yang terkenal dengan gagasannya tentang pendidikan kritis dan pembebasan. Paulo percaya bahwa pendidikan seharusnya membangkitkan kesadaran kritis dan membantu masyarakat yang tertindas untuk memahami serta mengubah kondisi sosial mereka. Freire mengkritik sistem pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai "*Banking Model of Education*", di mana siswa dianggap sebagai wadah pasif yang hanya menerima pengetahuan dari guru. Paulo juga menyampaikan bahwa:

1. Pendidikan harus bersifat dialogis dan mendorong kesadaran kritis (*critical consciousness*).
2. Siswa harus aktif dalam memahami realitas sosial dan berpartisipasi dalam perubahan sosial.

3. Implikasi pendidikan: Pendidikan harus membangun kesadaran sosial, terutama bagi kelompok yang tertindas.

#### **2.4.1 Indikator Pendidikan**

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah.

1. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Tingkat Pendidikan Tertinggi atau disingkat TPT adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. TPT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik lisan maupun tulisan.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang

berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi kualitas seseorang dalam berfikir maupun bertindak.

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Pendidikan**

Menurut Triwiyanto (2014), jenjang pendidikan merupakan tahapan yang akan dilalui seorang siswa dan ditentukan oleh perkembangannya, tujuan yang harus mereka capai, dan keterampilan yang perlu mereka peroleh dikenal sebagai tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan formal terbagi empat kategori sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau jenis sekolah sederajat lainnya adalah jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan menengah dan berlangsung selama 6 tahun.

2. Pendidikan Menengah

Merupakan lanjutan dari jenjang pendidikan dasar, yang berlangsung selama 3 tahun. Pendidikan menengah terdiri dari SMP dan MTS, atau sekolah sederajat lainnya.

3. Pendidikan Menengah Atas

Merupakan pendidikan menengah umum, seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah (MA), dan pendidikan menengah kejuruan, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Menengah Kejuruan (MAK), berlangsung selama 3 tahun.

4. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang akan ditempuh setelah jenjang pendidikan menengah yang berupa program pendidikan diplomat,

sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi atau perguruan tinggi dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan proposal, sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Rahmalia dkk. (2019), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia	Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan dan Kriminalitas	Analisis Regresi Panel dan <i>Fixed Effect Model</i>	Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan. Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia
2.	Fauziah (2019), Analisis Pengaruh Kemiskinan, Disparitas Pendapatan, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap	Kemiskinan, Disparitas Pendapatan, Pendidikan, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Kriminalitas	Analisis Regresi Data Panel dan <i>Fixed Effect Model</i>	Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Kriminalitas Properti. Gini Rasio

	Jumlah Kriminalitas Properti Di Provinsi Jawa Timur 2013-2017	Properti		berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan, Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan.
3.	Soraya dkk. (2024), Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023	Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Kriminalitas	Analisis Linier Berganda	Ketimpangan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas, Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia
4.	Rahmi dkk. (2018), Pengaruh Tingkat Putus Sekolah,	Tingkat Putus Sekolah, Kemiskinan, Pengangguran dan	Analisis Regresi Panel	Tingkat Putus Sekolah berpengaruh positif dan

	Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia	Kriminalitas		signifikan terhadap Kriminalitas Di Indonesia, Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia, Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia
5.	Indah (2023), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Provinsi Aceh	Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan dan Kriminalitas		Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kriminalitas, Pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap Kriminalitas, Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh
6.	E Hachica & M Triani (2022), Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk terhadap Kriminalitas di	Pendidikan, Pengangguran, Kepadatan Penduduk dan Kriminalitas	Data Panel	Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas, Pengangguran

	Indonesia			berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas, Kepadatan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia
7.	Azansyah,A. (2024), Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tindak Kriminalitas Di Sumatera Utara	Kemiskinan dan Tindak Kriminalitas	Analisis Panel Data	Kemiskinan berpengaruh positif Terhadap Tindak Kriminalitas di Sumatera Utara
8.	Fajri, R.E.,& Rizki,C.Z (2019), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk dan Pengangguran terhadap Kriminalitas Perkotaan Aceh	Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk, Pengangguran dan Kriminalitas	Data Panel	Kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas, PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas, Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Kota Aceh
9.	Edwart, A. O., & Azhar,Z. (2019),	Tingkat Pendidikan,	Analisis Regresi Data	Tingkat Pendidikan

	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia	kepadatan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas	Panel	dengan indikator Rata-Rata Sama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia, Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia, Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia.
10.	Cahyo, S. D. (2023), Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Kemiskinan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.	Jumlah Penduduk, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kriminalitas	Analisis Regresi Data Panel	Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Kriminalitas, Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Kriminalitas, Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan tidak

				signifikan terhadap Angka Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.
--	--	--	--	--

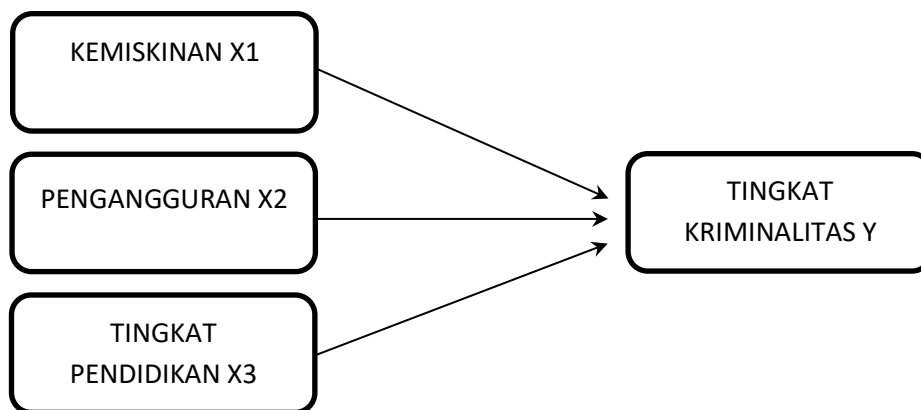
Sumber: Diolah (2025)

## 2.6 Kerangka Konseptual

Menurut landasan teori, pada penelitian ini Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran dan Kemiskinan sebagai variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ . Secara signifikan akan mempengaruhi kriminalitas sebagai variabel Y baik secara parsial maupun simultan untuk memperjelas pernyataan diatas maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Konseptual**



Sumber: Data diolah (2025)

## **2.7 Hipotesis**

Pada penulisan penelitian ini, penulis akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia

H<sub>2</sub> : Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia

H<sub>3</sub> : Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia